

MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN BERBASIS INOVATIF GOBAL

Andrew Grey^{1*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

¹Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424

Email: a.greysukardi@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Juli 2026

Revised

01 Agustus 2026

Accepted

31 Agustus 2026

Kata Kunci: Birokrasi, Kebahagiaan Masyarakat, Kepemimpinan Inovatif, Kesejahteraan, Manajemen Pemerintahan

Keywords: Bureaucracy, Governmental Management, Innovative Leadership, Public Happiness, Welfare

Abstrak

Tulisan ini mengkaji konsep manajemen dan kepemimpinan pemerintahan sebagai proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan publik secara efektif, efisien, dan berintegritas. Pergeseran paradigma dari birokrasi teknis yang kaku menuju institusi sosial yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat menjadi urgensi utama. Konsep Perbaikan Layanan Terintegrasi diperkenalkan sebagai filosofi manajemen inovatif yang mengintegrasikan budaya SMART (Self-Driven, Motivation, Action Oriented, Responsible Regulation, Team Collaboration), sasaran terukur (Smart Goal), dan kepemimpinan inovatif. Melalui empat pilar utama apresiasi sistem, pemahaman variasi, tata kelola kepemimpinan, serta pendekatan psikologi SMART konsep ini mentransformasi birokrasi menjadi organisme sosial yang humanis dan adaptif. Implementasinya bertujuan menciptakan budaya kerja berorientasi hasil prima, transparan, dan tepat waktu guna memodernisasi manajemen sektor publik di Indonesia, sehingga birokrasi beroperasi sebagai organisme pelayanan untuk kebahagiaan masyarakat.

Abstract

This paper examines the concept of governmental management and leadership as a systematic process of planning, organizing, and mobilizing resources to achieve public objectives effectively, efficiently, and with integrity. The urgency of shifting the paradigm from rigid technical bureaucracy toward social institutions focused on public welfare is highlighted. The Integrated Service Improvement Concept is introduced as an innovative management philosophy that integrates SMART culture (Self-Driven, Motivation, Action Oriented, Responsible Regulation, Team Collaboration), measurable targets (Smart Goals), and innovative leadership. Through four main pillars—system appreciation, variation understanding, leadership governance, and SMART psychology approach this concept transforms bureaucracy into a humanistic and adaptive social organism. Its implementation aims to create a work culture oriented toward excellent, transparent, and timely outcomes to modernize public sector management in Indonesia, enabling bureaucracy to operate as a service organism for public happiness.

PENDAHULUAN

Pemahaman dasar dalam memahami manajemen dan kepemimpinan pemerintahan berangkat dari kesadaran bahwa keduanya merupakan proses sistematis perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan sumber daya, serta kemampuan memengaruhi orang lain baik birokrasi maupun masyarakat untuk mencapai tujuan publik secara efektif, efisien, dan berintegritas. Konsep ini pada hakikatnya menggabungkan pengelolaan organisasional teknis dengan kewibawaan sosial untuk menciptakan *good governance*. Manajemen pemerintahan, yang lazim disebut manajemen publik, merupakan penggunaan fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) untuk memenuhi kebutuhan publik dengan sarana yang tersedia. Sinergi antara manajemen dan kepemimpinan menjadi keniscayaan karena manajemen berperan sebagai sistem atau mesin, sedangkan kepemimpinan adalah penggerakannya. Tanpa pemimpin yang kuat, manajemen pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal. Dalam kerangka konsep manajemen kepemimpinan pemerintahan, integrasi smart culture, smart goals, dan peran strategis kepemimpinan menjadikan birokrasi tidak lagi beroperasi sebagai mesin mekanis, melainkan hidup sebagai organisme sosial pelayanan untuk kebahagiaan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep manajemen kepemimpinan pemerintahan inovatif dalam kerangka *Collaborative Governance* telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor pemerintahan di Indonesia, seperti pendidikan, pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan pandemi. Hasil penelitian umumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh komitmen para pemangku kepentingan, komunikasi yang efektif, kepemimpinan, partisipasi, serta budaya organisasi yang mendukung. Sebaliknya, lemahnya komitmen, keterbatasan informasi, dan budaya birokrasi yang masih hierarkis menjadi hambatan utama dalam implementasi kolaborasi. Konsep manajemen kepemimpinan pemerintahan berbasis inovatif global menjadi semakin penting dalam konteks ini (Anas AN, N, 2025; Erlinda, D., & Putri, A, 2024; Febiyanti, S. Y., & Kriswibowo, A., 2023).

Penelitian mengenai reformasi birokrasi juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada teknologi dan perubahan struktural, tetapi juga pada konsep manajemen kepemimpinan pemerintahan berbasis inovatif, perubahan budaya organisasi, pola pikir aparatur, kepemimpinan transformasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Reformasi birokrasi yang efektif harus mampu mengintegrasikan inovasi, digitalisasi, dan nilai-nilai budaya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih adaptif dan berkualitas (Fetni, Sudirman Baso, & Anis Ribcalia Septiana, 2023; Hamim, R. N., Meidiana, A., Helmi, C., & Nurdin, N, 2024; Hendra, B., et al., 2024; Jalma, H., Aromatica, D., & Ariany, R, 2022). Dalam perspektif good governance, berbagai kajian menyimpulkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan kepercayaan publik, serta membangun iklim investasi dan kegiatan usaha yang kondusif. Namun demikian, modernisasi birokrasi tetap memerlukan penguatan konsep manajemen kepemimpinan yang berbasis inovatif global untuk menggerakkan budaya organisasi agar tata kelola pemerintahan berjalan secara berkelanjutan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa budaya oriental dalam manajemen pemerintahan—yang menekankan nilai moralitas, harmoni, gotong royong, musyawarah, loyalitas, dan tanggung jawab kolektif—memiliki relevansi dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi fondasi bagi birokrasi yang lebih humanis, etis, dan responsif. Manajemen dan kepemimpinan inovatif dalam meningkatkan budaya lokal dipandang mampu memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan apabila diintegrasikan secara tepat dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern (Jondar, A, 2021; Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X, 2024; Manuhutu, M. A., Ferdinandus, W., & Uktolseja, L. J, 2025).

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan tiga kecenderungan utama yang mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian. Kecenderungan pertama menunjukkan bahwa penelitian mengenai manajemen dan kepemimpinan inovatif dalam *Collaborative Governance* masih didominasi oleh studi sektoral dan belum banyak mengaitkannya dengan stabilitas kegiatan usaha. Kecenderungan kedua memperlihatkan bahwa penelitian reformasi birokrasi mengakui pentingnya budaya organisasi, tetapi belum mengembangkan konsep budaya yang operasional seperti budaya oriental SMART. Kecenderungan ketiga mengungkapkan bahwa penelitian mengenai good governance dan iklim investasi masih lebih berorientasi pada aspek ekonomi dan hukum, belum mengintegrasikan perspektif ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan *Collaborative Governance*, budaya oriental

SMART, dan Analisis SWAR sebagai strategi penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung stabilitas kegiatan usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) dan analisis konseptual (*conceptual analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasi, dan mengonstruksi kerangka konseptual manajemen dan kepemimpinan pemerintahan berbasis inovatif global secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif teoretis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu secara komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur akademik berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks, buku teks, dan monograf terkait manajemen publik, kepemimpinan pemerintahan, *Collaborative Governance*, *Dynamic Governance*, *Agile Governance*, dan reformasi birokrasi. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen kebijakan, khususnya peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Laporan-laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik manajemen dan kepemimpinan pemerintahan inovatif di Indonesia juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis (*systematic literature review*). Proses penelusuran menggunakan basis data akademik dengan kata kunci utama meliputi manajemen pemerintahan, kepemimpinan inovatif, *Collaborative Governance*, *Smart Culture*, *Smart Goals*, *good governance*, dan reformasi birokrasi. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan kebaruan publikasi untuk memastikan kualitas data yang digunakan.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif (*comparative analysis*). Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yakni memilah dan merangkum data dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dengan mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori tematik yang meliputi konsep manajemen pemerintahan, kepemimpinan inovatif, *Smart Culture* dan *Smart Goals*, tata kelola pemerintahan terintegrasi, serta konteks implementasi di Indonesia. Tahap berikutnya adalah sintesis dan interpretasi, yaitu mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dan interpretasi data yang telah dilakukan.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah manajemen pemerintahan berbasis fungsi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Pilar kedua adalah kepemimpinan inovatif yang mencakup kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial. Pilar ketiga adalah integrasi *Smart Culture*, *Smart Goals*, dan paradigma tata kelola modern yang meliputi *Good Governance*, *Collaborative Governance*, *Dynamic Governance*, dan *Agile Governance*. Ketiga pilar ini diarahkan pada tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui birokrasi yang humanis dan adaptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan pada dasarnya merupakan proses sistematis perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan sumber daya, serta kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan publik secara efektif, efisien, dan berintegritas. Konsep ini menggabungkan pengelolaan organisasional teknis dengan kewibawaan sosial untuk menciptakan *good governance*. Manajemen pemerintahan sebagai manajemen publik berfokus pada penggunaan fungsi manajemen untuk memenuhi kebutuhan publik, sementara kepemimpinan memberikan arah, visi, dan energi untuk menggerakkan seluruh elemen organisasi. Sinergi keduanya menghasilkan capaian berupa pelayanan publik yang prima, efisiensi sumber daya, dan pencapaian target pembangunan.

Kepemimpinan pemerintahan memiliki dua dimensi khas yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah kepemimpinan organisasional, yakni kemampuan memimpin aparat birokrasi agar patuh, kreatif, dan berkinerja tinggi. Dimensi kedua adalah kepemimpinan sosial, yakni kemampuan memengaruhi masyarakat luas menggunakan kewibawaan dan konsistensi. Karakteristik inovatif dari

kepemimpinan ini menuntut pemimpin untuk bertindak berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dikemukakan oleh Simangunsong. Pemimpin yang inovatif tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga menjadi penggerak perubahan dan transformasi organisasi secara keseluruhan. (Simangunsong, 2020).

Dalam konteks manajemen inovatif, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan merupakan perpaduan antara teknik pengelolaan sumber daya dan kemampuan menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional atau daerah secara efektif dan efisien. Manajemen pemerintahan dalam kerangka inovatif berfokus pada aspek teknis-administratif agar rencana membahagiakan masyarakat berjalan terukur, yang meliputi perencanaan strategis berupa penetapan tujuan organisasi, visi, misi, dan target pembangunan; pengelolaan sumber daya berupa pengalokasian anggaran, sarana, dan prasarana untuk melayani kebutuhan publik secara efisien; penerapan fungsi POAC dalam setiap kebijakan; serta pengintegrasian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran agar program dapat terlaksana. Sementara itu, kepemimpinan dalam kerangka inovatif berfokus pada aspek manusia dan arah strategis, yakni merumuskan terobosan pembangunan dan memberikan arah strategis, menggerakkan aparatur untuk melaksanakan tugas sesuai perencanaan, mengambil keputusan strategis dalam kondisi yang tidak menentu, serta memengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan tim untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada konteks keorganisasian, pengorganisasian (*organizing*) sebagai fungsi manajemen berperan mengatur, menyusun, dan membagi tugas serta tanggung jawab ke masing-masing unit kerja berdasarkan fungsi-fungsinya. Fokusnya terletak pada upaya menghubungkan individu dan sumber daya secara efektif untuk menciptakan struktur, keteraturan, dan memastikan rantai komando berjalan efisien. Kepemimpinan dalam konteks ini memberikan arah strategis dan menggerakkan aparatur agar pengorganisasian tidak hanya menjadi struktur kaku, tetapi menjadi wadah yang dinamis. Pemimpin menetapkan tujuan dan visi, memotivasi dan membimbing Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mendorong perubahan dan adaptasi struktur organisasi terhadap kebutuhan publik. Pada hakikatnya, pengorganisasian adalah struktur atau wadah, manajemen adalah cara mengelolanya, dan kepemimpinan adalah penggerak atau jiwanya untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Dalam konteks sumber daya manusia aparatur, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan harus berfokus pada transformasi birokrasi yang lincah (*agile*), profesional, dan berbasis digital. Pendekatan ini bertujuan mengubah pola pikir aparatur dari sekadar administratif menjadi berorientasi pelayanan dan hasil. Melalui kombinasi manajemen talenta yang kuat dan kepemimpinan yang adaptif, ASN diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara dalam konteks sumber keuangan, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan berfungsi sebagai proses strategis untuk merencanakan, mengalokasikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan dana negara atau daerah agar mencapai efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelayanan publik. Pemimpin yang efektif dalam konteks ini adalah mereka yang mampu mengintegrasikan perencanaan strategis dengan disiplin anggaran yang ketat sehingga setiap rupiah anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pada konteks manajemen kinerja, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan merupakan dua elemen yang saling melengkapi layaknya mesin dan kemudi. Manajemen berfokus pada struktur, ketertiban, dan proses administratif, sementara kepemimpinan memberikan visi, fokus, dan motivasi untuk mencapai kinerja terobosan. Manajemen kinerja pemerintahan yang berhasil membutuhkan kombinasi antara struktur manajemen yang rapi dan kepemimpinan yang kuat dalam hal visi dan eksekusi. Dalam konteks pelayanan umum, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan inovatif merupakan dua komponen krusial yang saling terkait. Pelayanan publik adalah inti dari fungsi pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien, transparan, dan responsif, sehingga kepemimpinan yang baik akan mendorong manajemen pelayanan publik yang efektif dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks pengawasan, manajemen dan kepemimpinan merupakan komponen yang tidak terpisahkan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dalam pemerintahan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan sebagai fungsi kepemimpinan untuk memastikan kinerja organisasi tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan. Di Indonesia, manajemen pengawasan diimplementasikan pula dalam pengadaan barang dan jasa serta penggunaan pemerintahan elektronik untuk transparansi dengan menggunakan kerangka *SMART Governance*. Pada konteks manajemen risiko sektor publik, pendekatan strategis diterapkan untuk memastikan tujuan

pembangunan tercapai, layanan publik tetap berjalan, dan akuntabilitas terjaga meskipun dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Berbeda dengan sektor swasta yang berfokus pada laba, manajemen risiko pemerintah bertujuan untuk memitigasi risiko politis, reputasi, dan kepatuhan hukum yang berdampak pada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasaran sektor publik, pendekatan strategis digunakan untuk meningkatkan kualitas, citra, dan adopsi layanan, kebijakan, atau program oleh masyarakat. Pemasaran di sektor publik tidak bertujuan mencari laba, melainkan menciptakan nilai bagi warga negara dan membangun kepercayaan publik. Demikian pula dalam konteks manajemen logistik, proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan aliran barang, jasa, dan informasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien, tepat waktu, dan transparan guna mengoptimalkan anggaran publik dan mempercepat distribusi bantuan atau layanan kepada masyarakat.

Dimensi penting lainnya dari manajemen dan kepemimpinan pemerintahan inovatif terletak pada pengelolaan kolaborasi, konflik, dan koordinasi. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan saat ini menuntut pergeseran paradigma dari birokrasi hierarkis yang kaku menuju model yang lebih fleksibel, partisipatif, dan terintegrasi. Kolaborasi, koordinasi, dan manajemen konflik merupakan tiga pilar utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam manajemen kolaborasi atau Collaborative Governance, kolaborasi pemerintahan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin dalam konteks ini bertindak sebagai fasilitator yang membangun kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama antar-aktor. Kepemimpinan kolaboratif dituntut untuk memfasilitasi dialog, membagi otoritas, dan mengakomodasi berbagai kepentingan, meskipun tantangan berupa ego sektoral, perbedaan budaya organisasi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya tetap harus diatasi.

Koordinasi sebagai fungsi manajemen berperan menyelaraskan, mengikat, dan memadukan semua aktivitas serta usaha agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Tanpa koordinasi, kolaborasi akan terhambat dan menciptakan tumpang tindih regulasi, terutama dalam program lintas kementerian dan lembaga. Penguatan komunikasi antar-lembaga, integrasi strategi, dan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi menjadi faktor kunci keberhasilan koordinasi. Sementara itu, konflik dalam birokrasi seperti perbedaan prioritas, sumber daya yang langka, atau konflik kepentingan tidak dapat dihindari namun dapat dikelola menjadi konstruktif. Pemimpin harus jeli menilai akar permasalahan dan menerapkan strategi kolaboratif yang berorientasi pada penyelesaian masalah serta hasil yang memuaskan semua pihak. Dalam hal ini, pemimpin berperan sebagai mediator, komunikator handal, dan pengambil keputusan yang bijaksana.

Kepemimpinan yang efektif dalam konteks kolaborasi, koordinasi, dan konflik menuntut pemimpin pemerintah memiliki karakter yang mampu menavigasi kompleksitas. Kepemimpinan fasilitatif diperlukan untuk menggerakkan berbagai pihak duduk bersama dalam menyelesaikan konflik sosial. Kepemimpinan agile dibutuhkan agar fleksibel beradaptasi dengan perubahan dan mampu membangun kolaborasi lintas sektoral. Kepemimpinan yang fokus pada pelayanan memandang jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Dalam konteks Indonesia, penerapan kolaborasi seringkali terhambat oleh ketidakseimbangan otoritas antara aktor negara dan non-negara serta lemahnya kepercayaan awal dan budaya birokrasi yang kaku. Namun dengan memaksimalkan potensi kolaborasi dan koordinasi yang didukung kepemimpinan yang kuat, pemerintah dapat meningkatkan kinerja, mempercepat pembangunan sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, dan menjaga kedamaian sosial.

Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan modern menuntut pergeseran paradigma dari birokrasi tradisional yang kaku menuju tata kelola yang lebih dinamis dan terintegrasi melalui empat paradigma utama. Dalam paradigma Good Governance, pemimpin memastikan prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan akuntabel berjalan dengan menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, memastikan responsivitas birokrasi dalam melayani kebutuhan masyarakat secara tepat waktu, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam paradigma Collaborative Governance, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang menjembatani aktor pemerintah dan non-pemerintah dengan membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, memfasilitasi diskusi untuk mencapai konsensus dalam kebijakan publik, dan menggerakkan kolaborasi internal antar dinas maupun eksternal.

Paradigma *Dynamic Governance* menuntut pemimpin menanamkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat secara adaptif dan fleksibel. Hal ini mencakup kemampuan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis serta

peningkatan kapabilitas dinamis organisasi untuk terus belajar dan berinovasi sebagaimana dikemukakan oleh Simangunsong (2017). Paradigma Agile Governance menuntut pemimpin menciptakan tata kelola yang cepat merespons krisis dan kebutuhan masyarakat melalui teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dengan menyederhanakan prosedur birokrasi yang berbelit, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan prima seperti *e-government*, serta berani melakukan terobosan inovasi untuk pelayanan yang lebih mudah dan cepat.

Pemimpin strategis harus mampu mengintegrasikan keempat paradigma tersebut menjadi satu kesatuan dengan membangun budaya organisasi yang lincah, kerja keras, disiplin, dan berorientasi pada hasil; berfungsi sebagai penggerak utama dalam adopsi inovasi daerah seperti *Smart City*; serta mampu merespons krisis secara cepat dengan pendekatan kolaboratif. Kepemimpinan yang berhasil di era kontemporer adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan tata kelola yang bersih dengan kecepatan dan kolaborasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Pada level pemerintahan, manajemen dan kepemimpinan memiliki karakteristik yang berbeda namun saling terkait. Di level pusat, manajemen dan kepemimpinan merupakan tulang punggung penyelenggaraan negara yang berfokus pada perumusan kebijakan strategis, perencanaan nasional, dan pengawasan jalannya birokrasi demi kesejahteraan rakyat. Pada tingkat ini, kepemimpinan bersifat strategis dan menuntut kompetensi tinggi untuk mengelola sumber daya negara secara efisien serta memastikan inovasi dalam layanan publik. Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk menggerakkan struktur manajemen, sementara manajemen yang baik memberikan landasan operasional bagi pemimpin untuk mengambil keputusan strategis.

Di level provinsi, sebagaimana didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen dan kepemimpinan berpusat pada peran Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pusat, Gubernur mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Pemimpin di tingkat provinsi dituntut untuk visioner dan adaptif, memiliki visi jangka panjang dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi. Gaya kepemimpinan yang efektif merupakan kombinasi antara kepemimpinan demokratis yang partisipatif dan transformasional untuk mendorong inovasi. Pengambilan keputusan harus berbasis data untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Manajemen pemerintahan di tingkat provinsi bertransformasi menjadi lebih efisien dengan menempatkan Sekretaris Daerah sebagai pembina ASN untuk menjaga profesionalitas birokrasi.

Keterkaitan dan dampak dari sinergi manajemen dan kepemimpinan inovatif menunjukkan bahwa kombinasi kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang efektif akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara signifikan. Kegagalan pembangunan seringkali bukan disebabkan oleh kekurangan sumber daya, melainkan oleh manajemen pemerintahan yang buruk. Manajemen menyediakan struktur dan prosedur, sementara kepemimpinan memberikan budaya dan energi untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, pemimpin pemerintahan inovatif diharapkan lebih efektif dalam fungsi perencanaan dan pengawasan untuk memaksimalkan pelayanan publik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

PENUTUP

Sinergi antara manajemen dan kepemimpinan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Manajemen berperan sebagai sistem atau mesin yang menyediakan struktur, prosedur, dan keteraturan, sedangkan kepemimpinan berfungsi sebagai penggerak yang memberikan visi, motivasi, dan energi transformatif. Tanpa pemimpin yang kuat, manajemen pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal, dan sebaliknya, tanpa manajemen yang baik, kepemimpinan tidak memiliki landasan operasional yang kokoh. Tantangan kontemporer berupa digitalisasi yang menuntut peningkatan literasi digital dan keamanan data, krisis yang mengharuskan perubahan manajemen menjadi lebih gesit, berbasis sains, dan berempati, serta dinamika politik yang berdampak pada penegakan profesionalisme birokrasi, semuanya menuntut reformulasi pendekatan manajemen dan kepemimpinan yang lebih inovatif dan adaptif.

Konsep manajemen dan kepemimpinan pemerintahan berbasis inovatif global yang mengintegrasikan *Smart Culture*, *Smart Goals*, dan kepemimpinan strategis terbukti mampu menjadi kerangka konseptual yang komprehensif untuk mentransformasi birokrasi dari mesin mekanis yang kaku menjadi organisme sosial yang humanis dan adaptif. Sinergi manajemen dan kepemimpinan menghasilkan capaian berupa pelayanan publik yang prima, efisiensi sumber daya, dan pencapaian

target pembangunan. Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan meliputi pengaturan ulang birokrasi agar lincah, koordinasi internal dan eksternal yang efektif, serta pengelolaan teknologi digital untuk inovasi pelayanan.

Integrasi empat paradigma tata Kelola *Good Governance*, *Collaborative Governance*, *Dynamic Governance*, dan *Agile Governance* memerlukan kepemimpinan yang mampu bertindak secara simultan sebagai fasilitator, inovator, dan katalisator. Kepemimpinan yang berhasil di era kontemporer adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan tata kelola yang bersih dengan kecepatan dan kolaborasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan inovatif harus diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai konteks mulai dari keorganisasian, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kinerja, pelayanan umum, pengawasan, logistik, risiko, hingga pemasaran sektor public untuk mencapai tata kelola yang optimal.

Pada akhirnya, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan merupakan sinergi yang memiliki capaian tujuan keberhasilan tata kelola yang tidak diukur dari ketuntasan administratif semata, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang nyata bagi masyarakat luas. Melalui integrasi Smart Culture, Smart Goals, dan kepemimpinan inovatif, birokrasi tidak lagi beroperasi sebagai mesin mekanis, melainkan hidup sebagai organisme sosial pelayanan untuk kebahagiaan masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anas AN, N. (2025). Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Inovatif dalam Collaborative Governance. [Jurnal terkait].
- Drucker, P. F. (1954). *The Practice of Management*. New York: Harper.
- Deming, W. E. (1993). *The New Economics for Industry, Government, Education*.
- Erlinda, D., & Putri, A. (2024). Penerapan Collaborative Governance dalam Sektor Pemerintahan di Indonesia. [Jurnal terkait].
- Febiyanti, S. Y., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance dan Kepemimpinan Inovatif dalam Pelayanan Publik. [Jurnal terkait].
- Fetni, Sudirman Baso, & Anis Ribcalia Septiana. (2023). Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi dalam Transformasi Pemerintahan. [Jurnal terkait].
- Hamim, R. N., Meidiana, A., Helmi, C., & Nurdin, N. (2024). Kepemimpinan Transformasional dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. [Jurnal terkait].
- Hendra, B., Pratama, S., Maghfiroh, S., Sifa, A., Rohmah, K. N., Ridwan, M., & Sofiah, U. (2024). Inovasi dan Digitalisasi dalam Reformasi Birokrasi. [Jurnal terkait].
- Jalma, H., Aromatica, D., & Ariany, R. (2022). Peningkatan Kapasitas SDM dan Reformasi Birokrasi. [Jurnal terkait].
- Jondar, A. (2021). *Good Governance dan Stabilitas Sosial dalam Pemerintahan*. [Jurnal terkait].
- Kmplus. (2014). *SMART KNOWLEDGE WORKER: Bagaimana Individu Menjaga, Mengembangkan Dan Mengalirkan Pengetahuan Ke Seluruh Sendi Organisasi*. Jakarta.
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Budaya Oriental dan Tata Kelola Pemerintahan Modern. [Jurnal terkait].
- Manuhutu, M. A., Ferdinandus, W., & Uktolseja, L. J. (2025). Budaya Lokal dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. [Jurnal terkait].

- Simangunsong, Fernandes. (2017). *Dynamic Governance: Kerangka Berpikir Baru Pengelolaan Pemerintahan*. [Buku/Jurnal terkait].
- Simangunsong, Fernandes. (2020). *Kepemimpinan Pemerintahan: Konsep dan Implementasi*. [Buku/Jurnal terkait].
- Supriyatno, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan (Dua Belas Langkah Strategis)*. CV Media Brilian.
- Soleh, A. & Firdanianty. (2011). *SMART KNOWLEDGE WORKER: Konsep SMART*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wasistiono, S. (2021). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan: Dari Klasik sampai ke Kontemporer*. Sumedang: IPDN Press.
- Wasistiono, S. (2025). *Empat Pilar Ilmu Pemerintahan*, Depok, Rajawali Pres